

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Algra, N.E, 1974, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht, Tjeenk Willink*, Groningen
- Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero berdasarkan Asas Kepailitan Hukum*, PT Alumni, Bandung:
- Anton Suyanto, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Pailit*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Bernard Nainggolan, 2014, *Peranana Kurator dalam pemberesan boedel Pailit*, Jakarta: Alumnus,
- Eliyana, 2004, *Actio Pauliana dan Aspek Pidana dalam Kepailitan dalam Hubungannya dengan Tugas Kurator*, Dalam: Emmy Yuhassarie (eds.), *Kewajiban Pailit dan standar Pelaporan dalam kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan, bagian kedua Rapat-Rapat Kreditor* Sinar Grafika, Jakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emmy Yuhassarie, 2005, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Hartini, R, 2007, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang.
- Henry Campbell Black, M. A., *Black's Law Dictionary*
- Hikmanto, Juwana, 2004, *Aspek Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan* Refika Aditama, Bandung.

- Imam Adi Cahyono, 2005, *Pentingnya Insolvency Test Dalam Permohonan Kepailitan* Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit* Grafindo Persada, Jakarta.
- Jerry Hoff, 2000, *Indonesian bankruptcy law*, PT Tatanusa, Jakarta
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Josye Andreas Neumann Barus, 2011, *Prinsip Umum Kepailitan, Instrumen Insolvensi dan Aspek Ekonomi PKPU*, Internal Study Business Law Society (BLS) Fakultas Hukum UI
- Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Mulyadi (2001), *Kepailitan dan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang Piutang*, dalam Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut sebagai Kartini Mulyadi 1), Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan Putusan Pengadilan Niaga*, Bandung: Alumni.
- M. Hadi Shubban, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit 1998 (dalam teori dan praktek)*, PT Citra Adithya Bakti Bandung.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nurdin, A, 2012, *Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*  
Bandung: Alumni
- Paulus Effendi Lotulung, 2001, *Pencocokan Piutang, dalam: Rudhy A. Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana* , Jakarta.
- R. Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan* , Kencana, Jakarta.
- R. Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia* , Jakarta: Pranamedia,
- Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan, bagian kedua Rapat Rapat Kreditor* dalam Michael C. Dennis (ed); *The Going Concept and The Auditor's Opinion Letter*.
- Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* , Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian* ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudhy A.Lontoh, Et.all.,(Ed), 2011, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Santoso, M. A. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan* Kencana, Jakarta.
- Satijpto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satijpto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum* ,Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, 2004, *Pengertian Jatuh Tempo* dalam Emmy Yuhassarie, *Undang Undang Kepailitan dan perkembangannya* , Pusat pengkajian Hukum, Jakarta.
- Siti Anisah, 2008, *Kreditpr dan debitor dalam hukum di Indonesia* , Total Media, Jakarta.

- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2015, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Kencana, Jakarta.
- Syamsudin M Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wiyono, E. H. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta.
- Zaeni Asyadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan.**

- Undang Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

#### **C. Jurnal, Media Online dan putusan pengadilan negeri.**

- Berita HukumOnline.com, *Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah* (<http://www.Hukumonline.com> diakses tanggal Selasa, 22 Desember 2022)
- Catur Irianto, 2015, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pekanbaru,

Hukumonline.com, *Indonesia Tidak Bisa Anut insolvensi Test* , 29 Agustus 2013  
(<http://www.Hukumonline.com> diakses tanggal 3 Desember 2022)

Hukumonline.com, *Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap*, 24 Mei 2014  
(<http://www.Hukumonline.com> diakses tanggal 12 Februari 2023)

Mengenal lebih jauh tentang Society 5.0  
<https://www.antaraneews.com/berita/2492665/mk-perlu-reformasi-penegakan-hukum-untuk-sambut-society-50> , di akses tanggal 9 September 2022

MK perlu reformasi penegakan hukum untuk sambut Society 5.0  
<https://www.antaraneews.com/berita/2492665/mk-perlu-reformasi-penegakan-hukum-untuk-sambut-society-50>, di akses tanggal 9 September 2022

Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls* , dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1

Rusli Effendi, dkk., *Teori Hukum* (Cet. I; Makassar: Hasanuddin University Press)

Siti Anisah, 2009, *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16